

## PENGUATAN LITERASI HUKUM TATA NEGARA BAGI PENDIDIK MENENGAH DI KABUPATEN MALANG

Tikka Dessy Harsanti<sup>1)</sup>, Rika Novitasari<sup>2)</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Wisnuwardhana, Indonesia

<sup>1</sup>[bintanggaurel6@gmail.com](mailto:bintanggaurel6@gmail.com), <sup>2</sup>[rikanovita29@gmail.com](mailto:rikanovita29@gmail.com)

Diterima 14 Agustus 2025, Direvisi 2 Oktober 2025, Disetujui 5 Oktober 2025

### ABSTRAK

Program penguatan literasi hukum tata negara dilaksanakan untuk menjawab rendahnya pemahaman guru PPKn terhadap konsep konstitusi dan penerapannya dalam pembelajaran. Kegiatan ini diawali dengan tahap koordinasi bersama MGMP PPKn Kabupaten Malang guna menyepakati kebutuhan, tujuan, serta bentuk intervensi yang tepat. Selanjutnya, dilakukan penyusunan dan distribusi modul ringkas yang dirancang agar mudah dipahami dan relevan dengan praktik pembelajaran. Pada tahap implementasi, guru mengikuti sosialisasi konsep dasar, workshop pengembangan perangkat ajar, penyuluhan interaktif mengenai isu-isu aktual, serta praktikum perancangan desain pembelajaran yang kontekstual. Selama kegiatan, komunitas praktik berbasis daring dibentuk sebagai ruang diskusi dan pertukaran pengalaman antar guru. Evaluasi dilakukan melalui pretest–posttest untuk mengukur peningkatan pengetahuan, observasi partisipatif terhadap keterampilan pedagogik, dan analisis tingkat keterlibatan guru dalam forum daring. Hasil menunjukkan peningkatan rata-rata 34,7% pada pemahaman konseptual, 29,5% pada keterampilan pedagogik, serta partisipasi aktif hingga 85% dalam komunitas praktik. Modul ringkas dinilai memudahkan pemahaman materi, sedangkan komunitas daring memperkuat kolaborasi antarguru. Dengan demikian, program ini terbukti efektif dalam mendorong guru mengintegrasikan isu hukum tata negara secara kontekstual sekaligus meningkatkan kompetensi profesional.

**Kata kunci:** literasi hukum; PPKn; modul ringkas; komunitas daring; guru sekolah menengah

### ABSTRACT

The constitutional law literacy strengthening program was implemented to address the low level of PPKn teachers' understanding of constitutional concepts and their application in classroom instruction. The activity began with a coordination stage with the PPKn Teacher Working Group (MGMP) of Malang Regency to identify needs, set objectives, and determine appropriate intervention strategies. Subsequently, a concise module was developed and distributed to provide accessible and relevant learning materials. The implementation stage consisted of conceptual socialization, workshops on teaching material development, interactive counseling on current issues, and practicum sessions for designing contextual lesson plans. During the program, an online community of practice was established to facilitate discussion and experience sharing among teachers. Evaluation was conducted through pretest–posttest to measure knowledge improvement, participatory observation to assess pedagogical skills, and analysis of teacher engagement in the online forum. The results showed an average increase of 34.7% in conceptual understanding, 29.5% in pedagogical skills, and up to 85% active participation in the community of practice. The concise module was perceived as effective in simplifying content, while the online community enhanced collaboration and peer learning. Thus, the program proved effective in enabling teachers to integrate constitutional law issues contextually in their classrooms while strengthening professional competence.

**Keywords:** legal literacy; civic education; concise module; online community; secondary school teachers

### PENDAHULUAN

Berada pada jenjang menengah (SMA/SMK/MA), pendidik di Kabupaten Malang memegang peran strategis dalam membentuk kesadaran konstitusional peserta didik—yakni kemampuan memahami prinsip-prinsip UUD 1945, institusi negara, hak–kewajiban warga, serta etika kehidupan berbangsa. Kebijakan Kurikulum Merdeka menegaskan orientasi tersebut melalui

mata pelajaran Pendidikan Pancasila/PPKn dan penguatan Profil Pelajar Pancasila yang menuntut pembelajaran kontekstual, berbasis isu, serta berorientasi pada praktik kewargaan (project, studi kasus, dan diskusi deliberatif). Dengan kerangka ini, guru diharapkan tidak hanya mentransmisikan konsep, tetapi memfasilitasi nalar kritis siswa atas peristiwa kenegaraan mutakhir—mulai dari

dinamika pemilu hingga putusan lembaga yudisial yang berdampak luas (Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, 2023).

Hasil asesmen awal tim pengabdian pada kelompok sasaran di Kabupaten Malang menunjukkan sebagian guru masih menempatkan hafalan definisi dan peristilahan sebagai penopang utama capaian belajar, sementara pemanfaatan isu aktual, praktik analisis putusan, dan studi kasus lokal (misalnya tata kelola daerah, pelayanan publik, atau partisipasi warga di desa/kelurahan) belum konsisten. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Firza & Saleh, 2025) yang menyoroti jarak antara tuntutan kurikulum yang kontekstual dengan pembelajaran yang kerap terasa terlalu teoritis, sehingga siswa kesulitan mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari dan praktik kewargaan nyata. Kondisi tersebut menegaskan pentingnya bahan ajar ringkas yang terkurasi dan kontekstual untuk memandu guru mengintegrasikan isu aktual dan kasus lokal ke dalam skenario pembelajaran.

Di sisi ketersediaan sumber, akses pendidik terhadap materi hukum tata negara yang padat, mutakhir, dan mudah dipakai di kelas masih terbatas. Buku teks resmi memang telah tersedia, tetapi guru tetap membutuhkan pengayaan yang lebih ringkas dan aplikatif—misalnya lembar analisis putusan, peta konsep kelembagaan, atau lembar kerja problem-based yang memotret kasus di Kabupaten Malang—agar transfer konsep beralih menjadi pengalaman belajar kewargaan yang bermakna. Arah kebijakan kurikulum sendiri mendukung pergeseran ke pembelajaran yang relevan, lintas isu, dan memberi ruang bagi proyek serta studi kasus sebagai wahana internalisasi nilai dan kaidah bernegara (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2021).

Dalam khazanah pengabdian/penelitian terdahulu, banyak program berfokus pada peningkatan metode ajar (misalnya problem-based learning, role play, atau pengembangan media), yang terbukti membantu mengaktifkan kelas. Namun, program tersebut umumnya bersifat jangka pendek, tidak spesifik pada substansi hukum tata negara yang mutakhir, dan jarang membangun mekanisme pendampingan pascapelatihan; akibatnya, praktik baik kerap terhenti setelah pelatihan. Di tingkat penelitian, temuan (Khusna & Priyanti, 2023) juga menegaskan bahwa tanpa contoh nyata dan tugas aplikatif, peserta didik sulit mempraktikkan nilai-nilai kewargaan; ini memperkuat urgensi intervensi yang menyediakan paket materi ringkas berbasis kasus.

Pengabdian ini dirancang untuk menutup kesenjangan (GAP) tersebut melalui tiga keluaran sederhana namun berdaya guna: (1) modul ringkas hukum tata negara untuk guru menengah di Kabupaten Malang—berisi peta konsep inti,

skenario studi kasus lokal, lembar analisis isu aktual, serta panduan asesmen formatif; (2) artikel pengabdian yang mendokumentasikan model, proses, dan temuan implementasi sebagai rujukan terbuka; dan (3) komunitas praktik daring lintas sekolah sebagai wahana berbagi, refleksi, dan pembaruan materi secara berkelanjutan. Komunitas praktik dipilih karena bukti empiris menunjukkan keterlibatan guru dalam komunitas/komunitas belajar berkorelasi positif dengan kemampuan pedagogik dan mempercepat adopsi praktik mengajar yang lebih efektif. Dengan kombinasi modul ringkas (mudah dipakai di kelas), dokumentasi ilmiah (mudah ditiru), dan komunitas praktik daring (mudah dirawat), program ini menargetkan keberlanjutan perubahan—dari kelas ke jejaring guru—serta keselarasan dengan orientasi Kurikulum Merdeka dan Profil Pelajar Pancasila. Oleh karena itu, tujuan utama kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman konseptual, keterampilan pedagogik, dan kesadaran kritis guru PPKn di Kabupaten Malang dalam mengintegrasikan isu-isu hukum tata negara secara kontekstual ke dalam praktik pembelajaran di kelas.

## **METODE**

Pengabdian masyarakat ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memperoleh gambaran yang mendalam terkait proses pelaksanaan kegiatan, persepsi peserta, serta luaran yang dihasilkan. Pendekatan ini dipilih karena mampu mendokumentasikan pengalaman nyata dan dinamika interaksi yang terjadi selama kegiatan berlangsung (Creswell & Poth, 2018). Fokus utama pengabdian adalah pada dokumentasi proses pelatihan, persepsi peserta terhadap materi hukum tata negara, serta hasil terukur berupa modul ringkas, artikel pengabdian, dan komunitas praktik daring.

Kegiatan dilaksanakan di Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) PPKn dengan keterlibatan guru lintas mata pelajaran di Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Durasi kegiatan adalah dua bulan, mencakup pelatihan inti dan pendampingan daring. Lokasi ini dipilih karena memiliki jumlah pendidik menengah yang cukup besar dan tingkat kebutuhan peningkatan literasi hukum tata negara yang signifikan (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2023).

Tahapan kegiatan terdiri dari lima bagian. Pertama, tahap persiapan yang mencakup koordinasi dengan MGMP dan Dinas Pendidikan setempat, serta penyusunan modul ringkas berbasis hukum tata negara yang kontekstual dan mudah diaplikasikan di kelas. Kedua, pelaksanaan pelatihan inti yang berfokus pada penyampaian materi hukum tata negara terkini, pengenalan modul ringkas, dan simulasi penggunaannya dalam pembelajaran.

Ketiga, pembentukan komunitas praktik daring melalui platform seperti WhatsApp atau Learning Management System (LMS) sederhana, yang berfungsi sebagai sarana diskusi, berbagi materi, dan tanya jawab antarpeserta. Keempat, tahap pendampingan, di mana fasilitator memantau diskusi daring, memberikan umpan balik, serta mendukung penerapan modul dan materi dalam praktik pembelajaran di sekolah. Kelima, tahap dokumentasi dan publikasi yang menghasilkan artikel pengabdian masyarakat berbasis temuan lapangan (Sugiyono, 2022).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif selama pelatihan dan interaksi dalam komunitas daring, wawancara semi-terstruktur dengan peserta terpilih untuk menggali persepsi dan pengalaman mereka, serta analisis dokumen terhadap modul dan perangkat ajar yang dihasilkan atau diadaptasi oleh peserta. Analisis data menggunakan pendekatan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola-pola pengalaman, strategi, dan tantangan peserta dalam mengimplementasikan materi (Braun & Clarke, 2019). Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dengan memadukan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi (Miles et al., 2019).

Evaluasi keberhasilan kegiatan dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif. Secara kuantitatif, keberhasilan diukur melalui perbandingan nilai pretest dan posttest guna menilai peningkatan pemahaman konseptual peserta, serta rekapitulasi tingkat keaktifan guru dalam komunitas praktik daring. Sementara itu, secara kualitatif keberhasilan dinilai melalui refleksi peserta, hasil wawancara mendalam, serta penilaian terhadap kualitas perangkat ajar yang dikembangkan. Pendekatan evaluasi ini tidak hanya memotret peningkatan pengetahuan, tetapi juga mengukur sejauh mana keterampilan pedagogik dan sikap kritis guru berkembang setelah mengikuti program, sehingga memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas pengabdian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

#### 1. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pengabdian masyarakat yang berfokus pada penguatan literasi hukum tata negara bagi pendidik menengah ini diikuti oleh 28 peserta, yang terdiri dari guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) serta guru lintas mata pelajaran dari berbagai sekolah menengah di Kabupaten Malang. Peserta berasal dari Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang, dengan latar belakang pendidikan mayoritas lulusan S1 kependidikan, sedangkan sebagian kecil berasal dari disiplin ilmu lain namun telah memiliki pengalaman mengajar rata-rata di atas lima tahun. Hal ini

memberikan keberagaman perspektif sekaligus memperkaya dinamika diskusi selama pelatihan.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan di Gedung Serba Guna SMP Negeri 1 Pakis Kabupaten Malang. Gedung ini dipilih karena lokasinya yang strategis, fasilitas yang memadai, dan kenyamanan ruang yang mendukung interaksi partisipatif. Pelatihan berlangsung selama dua hari, dengan tingkat kehadiran peserta mencapai 96%, yang menunjukkan komitmen dan motivasi tinggi dari para guru untuk meningkatkan pengetahuan serta keterampilan dalam mengajarkan materi hukum tata negara.



Gambar 1. Pembukaan Pelatihan

Pada hari pertama, kegiatan diawali dengan sambutan dan penjelasan tujuan program, dilanjutkan dengan sesi pemaparan materi hukum tata negara yang relevan dengan kurikulum pendidikan menengah. Materi disampaikan dengan pendekatan interaktif yang memadukan paparan konseptual, studi kasus, dan simulasi. Sesi siang hari difokuskan pada pengenalan modul ringkas, meliputi penjelasan struktur, sistematika penyajian, dan strategi pemanfaatan di kelas. Pada hari kedua, peserta terlibat dalam diskusi kelompok kecil untuk membedah isi modul, mengidentifikasi relevansinya dengan kebutuhan pembelajaran, dan menyusun rancangan penerapan di sekolah masing-masing.



Gambar 1. Proses Diskusi

Dokumentasi visual ini menjadi bukti autentik keberlangsungan kegiatan sekaligus

menguatkan validitas laporan pelaksanaan (Sugiyono, 2022).

## 2. Respon Peserta terhadap Modul Ringkas

Hasil evaluasi pasca-pelatihan menunjukkan bahwa mayoritas peserta merespons positif modul ringkas yang diberikan. Sebanyak 92% peserta menyatakan bahwa modul ini mudah dipahami karena menggunakan bahasa yang lugas, tidak bertele-tele, dan didukung oleh tata letak yang rapi. Penyajian materi dilengkapi diagram alur, tabel ringkas, dan ilustrasi yang memudahkan visualisasi konsep hukum tata negara yang umumnya dianggap abstrak oleh siswa.

Dari segi relevansi, 89% peserta menilai bahwa isi modul sangat sesuai dengan kebutuhan mereka dalam mengajar, terutama pada topik-topik seperti pembagian kekuasaan negara, hak dan kewajiban warga negara, serta mekanisme pembentukan undang-undang. Beberapa guru bahkan telah mencoba menerapkan modul ini di kelas dalam waktu kurang dari satu minggu setelah pelatihan. Salah satu contoh datang dari guru PPKn di SMK IT ASY-SYADZILI Pakis, yang memanfaatkan bagian simulasi sidang dari modul untuk mengadakan role-play di kelas. Aktivitas ini tidak hanya membuat siswa lebih memahami prosedur legislasi, tetapi juga meningkatkan partisipasi aktif mereka.



Gambar 3. Sampul Modul

Kejelasan visual dan keterpaduan isi modul dinilai mendukung efektivitas pembelajaran berbasis literasi hukum di kelas (Rahmawati & Prasetyo, 2021).

## 3. Aktivitas Komunitas Praktik Daring

Pasca-pelatihan, peserta difasilitasi untuk bergabung dalam komunitas praktik daring yang dibentuk melalui grup WhatsApp dan diperkuat dengan pertemuan rutin via Zoom setiap dua minggu sekali. Dalam periode dua bulan pertama, komunitas ini menunjukkan intensitas diskusi yang konsisten, dengan rata-rata empat hingga lima topik dibahas setiap minggunya.



Gambar 4. Diskusi Secara Daring

Topik diskusi yang dominan mencakup adaptasi materi hukum tata negara untuk berbagai jenjang pendidikan, pengembangan strategi pembelajaran berbasis proyek, serta integrasi isu-isu aktual dalam pembelajaran PPKn. Selain diskusi, komunitas ini juga menjadi sarana berbagi materi ajar. Tercatat ada 17 dokumen yang dibagikan, termasuk Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD), dan bahan presentasi yang semuanya merupakan adaptasi atau pengembangan dari modul ringkas.

Kegiatan kolaboratif antar guru juga meningkat secara signifikan. Terdapat delapan proyek pembuatan materi ajar yang dikerjakan secara bersama oleh anggota lintas sekolah dan mata pelajaran. Dampak positif ini sejalan dengan temuan (Wenger, 2015) yang menegaskan bahwa komunitas praktik daring dapat memperkuat jejaring profesional sekaligus mendorong inovasi pengajaran.

Tabel 1. Rangkum Aktivitas Komunitas Praktik Daring

Aktivitas	Frekuensi	Keterangan
Topik diskusi	4-5 per minggu	Fokus pada adaptasi modul dan strategi pembelajaran
Materi dibagikan	17 dokumen	RPP, LKPD, bahan presentasi
Pertemuan Zoom/Gmeet	4 kali	Diskusi tematik, berbagi praktik baik, dan sesi tanya jawab
Kolaborasi pembuatan materi ajar	8 proyek	Dikerjakan lintas sekolah dan lintas mata pelajaran

## Pembahasan

Pelaksanaan program penguatan literasi hukum tata negara bagi guru jenjang menengah di Kabupaten Malang melalui integrasi modul ringkas dan komunitas praktik berbasis daring menunjukkan kontribusi signifikan terhadap peningkatan pemahaman materi, keterampilan pedagogik, dan kesadaran kritis para pendidik. Penyusunan modul

dilakukan melalui analisis kebutuhan yang mendalam, melibatkan guru sasaran sebagai mitra partisipatif dalam tahap perencanaan. Materi yang dimuat bersifat substantif, relevan dengan kompetensi inti dan dasar pada kurikulum PPKn, serta dilengkapi dengan studi kasus aktual, infografis, dan panduan aplikatif. Struktur modul yang ringkas, sistematis, dan menggunakan bahasa komunikatif mempermudah guru dalam memahami konsep-konsep kompleks hukum tata negara, sekaligus meningkatkan keterhubungan antara materi dan konteks praktik pembelajaran di kelas. Berdasarkan hasil evaluasi, 92% peserta menyatakan bahwa modul membantu mereka memahami materi secara lebih jelas, sedangkan 89% menilai modul relevan dan aplikatif. Temuan ini memperkuat pandangan (Umamy et al., 2023) bahwa materi pembelajaran yang ringkas, kontekstual, dan komunikatif dapat mempercepat internalisasi pengetahuan serta menguatkan keterampilan berpikir kritis guru, terutama ketika dipadukan dengan stimulus literasi berbasis kasus nyata.

Keberadaan komunitas praktik daring—yang difasilitasi melalui grup WhatsApp dan pertemuan Zoom—menciptakan ruang kolaborasi berkelanjutan yang memperluas capaian program. Aktivitas komunitas tidak hanya berfokus pada distribusi materi, tetapi juga mencakup diskusi pedagogik, pertukaran rancangan pembelajaran, serta pemberian umpan balik yang bersifat konstruktif. Pola interaksi ini mencerminkan prinsip Professional Learning Community (PLC) sebagaimana dikemukakan (DuFour, 2004) dan (Kruse et al., 1994), yakni pengembangan profesional berbasis kolaborasi reflektif dan partisipasi aktif. Model ini juga mendorong terciptanya mekanisme pendampingan sejawat (peer mentoring) yang berkelanjutan, sehingga pembelajaran tidak berhenti pada kegiatan pelatihan formal. Hal ini sejalan dengan penelitian Timur, (Saefudin & Sriwiyanti, 2023) yang menunjukkan bahwa komunitas belajar guru mampu meningkatkan kapasitas profesional melalui sinergi pengalaman, pertukaran praktik terbaik, dan dukungan emosional antarpendidik.

Keunggulan pendekatan integratif ini terletak pada sifatnya yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan. Berbeda dengan pelatihan konvensional yang umumnya terhenti setelah sesi tatap muka, model ini memperluas proses pembelajaran melalui jejaring digital yang memungkinkan guru terus memperoleh dukungan, memperbarui pengetahuan, dan mengatasi permasalahan pembelajaran yang muncul secara dinamis. Pendekatan ini relevan dengan temuan (Harjanto et al., 2018) yang menegaskan bahwa pengembangan profesional guru di wilayah dengan

keterbatasan sumber daya akan lebih efektif jika ditopang oleh komunitas digital yang aktif dan akses terhadap materi terstruktur. Selain itu, pembelajaran daring yang terintegrasi dengan sumber belajar mandiri terbukti mampu meningkatkan partisipasi dan motivasi, sebagaimana diuraikan oleh Umamy (2025) dalam konteks strategi literasi berbasis sastra yang menumbuhkan nilai interkultural.

Evaluasi keberhasilan kegiatan dilakukan melalui kombinasi pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Secara kuantitatif, keberhasilan program dievaluasi melalui instrumen pretest dan posttest yang dirancang untuk mengukur dua aspek utama, yakni pemahaman konseptual terkait hukum tata negara dan keterampilan pedagogik dalam mengintegrasikan materi tersebut ke dalam pembelajaran. Hasil pengukuran ditampilkan pada Tabel 2 berikut:

**Tabel 2.** Hasil Pretest dan Posttest Peserta Program

Aspek yang Diukur	Nilai Rata-rata Pretest	Nilai Rata-rata Posttest	Peningkatan (%)
Pemahaman Konseptual	56,8	91,5	34,7
Keterampilan Pedagogik	58,2	87,7	29,5

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa rata-rata nilai peserta pada aspek pemahaman konseptual meningkat sebesar 34,7%, sedangkan keterampilan pedagogik meningkat sebesar 29,5%. Temuan ini menunjukkan bahwa modul ringkas yang digunakan mampu mempercepat internalisasi pengetahuan konseptual, sementara komunitas praktik daring berkontribusi dalam memperkuat keterampilan pedagogik melalui diskusi reflektif dan berbagi pengalaman nyata di kelas. Peningkatan yang konsisten pada kedua aspek juga menandakan bahwa desain program telah sesuai dengan kebutuhan peserta, sejalan dengan prinsip *professional development* guru yang menekankan pentingnya pembelajaran berkelanjutan, kontekstual, dan berbasis kolaborasi. Dengan demikian, secara empiris program ini dapat dikatakan berhasil mencapai tujuan utamanya, yaitu meningkatkan kapasitas profesional guru PPKn pada ranah konseptual maupun pedagogik.

Secara kualitatif, evaluasi diperoleh melalui observasi partisipatif selama sesi pelatihan, refleksi tertulis guru, wawancara semi-terstruktur, serta analisis terhadap perangkat ajar yang dihasilkan. Evaluasi ini juga mencakup pemantauan aktivitas komunitas praktik daring, seperti intensitas diskusi, kualitas umpan balik, serta tingkat kolaborasi antar guru. Dengan demikian, evaluasi tidak hanya menilai perubahan kognitif, tetapi juga menekankan pada transformasi sikap, keterampilan

reflektif, dan keberlanjutan kolaborasi. Model evaluasi berlapis ini sejalan dengan kerangka penjaminan mutu pengembangan profesional guru yang menekankan perlunya triangulasi data untuk memastikan keandalan hasil (Miles et al., 2019).

Dalam implementasinya, sejumlah faktor pendukung turut memperkuat keberhasilan program, antara lain tingginya motivasi guru peserta, dukungan organisasi MGMP PPKn, ketersediaan fasilitas teknologi di sebagian besar sekolah, dan komitmen fasilitator dalam memberikan pendampingan. Namun demikian, program juga menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan waktu akibat beban administrasi guru, ketidakmerataan kualitas koneksi internet, variasi kemampuan literasi digital, serta keterbatasan inovasi dalam merancang aktivitas pembelajaran berbasis hukum tata negara. Untuk mengatasi hal ini, strategi mitigasi yang disarankan mencakup penyediaan materi dalam format cetak atau offline, pelatihan keterampilan teknologi berbasis praktik, serta penjadwalan pertemuan daring yang lebih fleksibel agar inklusif bagi semua peserta.

Salah satu aspek yang menjadi pembeda utama modul ini adalah dimensi reflektif dan kritis yang tertanam dalam setiap materi. Tidak hanya memaparkan norma hukum dan prosedur konstitusional, modul mendorong guru untuk mengkaji dilema etis dalam kebijakan publik dan menganalisis implikasi sosial dari penerapan hukum. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Perdana (2025) yang menekankan bahwa wacana profesional kerap menyamarkan dilema etika, sehingga penting untuk mengungkapkan dimensi tersebut secara terbuka agar peserta didik mampu membangun kesadaran kritis. Dalam konteks literasi hukum, integrasi refleksi kritis dapat menggeser fokus pembelajaran dari sekadar transfer informasi menjadi pembentukan kompetensi kewargaan yang berbasis tanggung jawab moral.

Dengan demikian, integrasi modul ringkas dan komunitas praktik daring tidak hanya berdampak pada peningkatan kompetensi kognitif guru, tetapi juga memperkuat dimensi afektif dan kolaboratif, membentuk ekosistem pembelajaran profesional yang berorientasi pada pembelajaran sepanjang hayat. Model ini memiliki potensi untuk direplikasi pada konteks lain, dengan penyesuaian materi dan media interaksi sesuai kebutuhan, sekaligus menjadi strategi efektif dalam memperkuat pendidikan demokrasi berbasis literasi hukum di tingkat sekolah menengah.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Pelaksanaan program penguatan literasi hukum tata negara bagi guru jenjang menengah di Kabupaten Malang melalui integrasi modul ringkas dan komunitas praktik berbasis daring menunjukkan

efektivitas yang signifikan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yakni meningkatkan pemahaman konseptual, keterampilan pedagogik, serta kesadaran kritis para pendidik. Modul yang dirancang secara sistematis, ringkas, dan kontekstual terbukti memudahkan guru dalam memahami materi hukum tata negara secara lebih cepat sekaligus aplikatif, sementara komunitas praktik daring menjadi ruang kolaboratif yang memungkinkan interaksi reflektif, pertukaran pengalaman, serta penguatan profesionalisme secara berkelanjutan. Temuan evaluatif memperlihatkan adanya peningkatan signifikan pada persepsi relevansi materi, kemampuan guru dalam mengaitkan konsep dengan praktik pembelajaran di kelas, serta tingginya partisipasi aktif dalam forum diskusi yang mengindikasikan tercapainya dimensi kognitif, afektif, dan sosial dari program.

Namun demikian, implementasi kegiatan tidak terlepas dari berbagai kendala, antara lain keterbatasan waktu akibat beban administrasi guru, ketidakmerataan akses dan kualitas jaringan internet, serta perbedaan tingkat keterampilan digital di kalangan peserta. Untuk itu, beberapa langkah strategis perlu ditempuh agar keberlanjutan dan efektivitas program semakin optimal. Pertama, menyediakan versi cetak atau offline dari modul sebagai alternatif bagi guru yang menghadapi kendala jaringan. Kedua, memberikan pelatihan teknologi praktis berbasis kebutuhan nyata bagi guru dengan literasi digital terbatas. Ketiga, merancang jadwal pertemuan daring yang lebih fleksibel agar dapat menyesuaikan dengan kondisi peserta. Keempat, memperluas lingkup komunitas praktik dengan melibatkan pemangku kepentingan pendidikan lain, seperti pengawas sekolah dan akademisi PPKn, sehingga terjadi pertukaran perspektif yang lebih kaya dan mendalam. Dengan strategi tersebut, program ini tidak hanya memperkuat kompetensi profesional guru, tetapi juga berkontribusi pada terwujudnya pendidikan demokrasi dan penguatan kesadaran konstitusional di sekolah menengah secara berkelanjutan.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan program ini. Ucapan terima kasih disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) PPKn Kabupaten Malang atas dukungan penuh, koordinasi, dan fasilitasi selama kegiatan berlangsung. Terima kasih juga ditujukan kepada para guru peserta program yang telah menunjukkan dedikasi tinggi, keterbukaan untuk belajar, serta kesediaan berbagi pengalaman dan praktik terbaik. Penghargaan khusus diberikan kepada tim fasilitator dan

narasumber yang telah menyusun, mengembangkan, dan mengadaptasi modul pembelajaran sesuai konteks kebutuhan lapangan. Tidak lupa, apresiasi disampaikan kepada rekan sejawat yang telah memberikan masukan konstruktif melalui proses diskusi ilmiah dan penelaahan sejawat (peer review), sehingga pengabdian ini dapat terselesaikan dengan baik dan memberikan kontribusi bagi pengembangan literasi hukum di dunia pendidikan.

#### DAFTAR RUJUKAN

Braun, V., & Clarke, V. (2019). Reflecting on reflexive thematic analysis. *Qualitative Research in Sport, Exercise and Health*, 11(4), 589–597.  
<https://doi.org/10.1080/2159676X.2019.1628806>

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.

Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. (2023). *Data guru dan sekolah tingkat menengah Kabupaten Malang*. Pemerintah Kabupaten Malang.

DuFour, R. (2004). What is a 'professional learning community'? *Educational Leadership*.

Firza, N., & Saleh, S. (2025). Implementation of Profil Pelajar Pancasila in Citizenship Education learning at MAN 1 Medan. *Curricula: Journal of Curriculum Development*, 4(1), 797–814.  
<https://doi.org/10.17509/curricula.v4i1.85545>

Harjanto, I., Lie, A., Wihardini, D., Pryor, L., & Wilson, M. (2018). Community-based teacher professional development in remote areas in Indonesia. *Journal of Education for Teaching*, 44(2), 212–231.  
<https://doi.org/10.1080/02607476.2017.1415515>

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2023). *Petunjuk awal komunitas belajar dalam sekolah*. Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas, dan Dikmen.  
<https://bpmppgorontalo.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2023/03/Petunjuk-Awal-Komunitas-Belajar-dalam-Sekolah-1.pdf>

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2021). *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan: Buku panduan guru Kelas VI (Kurikulum 2013)*. Kemdikbud.  
[https://static.buku.kemdikbud.go.id/content/pdf/bukuteks/kurikulum\\_2013/kd\\_2018/ppkn/KLS\\_VI/PPKn\\_BG\\_KLS\\_VI.pdf](https://static.buku.kemdikbud.go.id/content/pdf/bukuteks/kurikulum_2013/kd_2018/ppkn/KLS_VI/PPKn_BG_KLS_VI.pdf)

Khusna, R., & Priyanti, N. (2023). Pengaruh komunitas belajar terhadap kemampuan pedagogik guru di Ikatan NSIN TK Bekasi. *Jurnal Ilmiah Potensia*, 8(2), 252–260.  
<https://doi.org/10.33369/jip.8.2.252-260>

Kruse, S., Seashore Louis, K., & Bryk, A. S. (1994). Building professional community in schools. *Issues in Restructuring Schools*.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2019). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.

Rahmawati, N., & Prasetyo, Z. K. (2021). Desain bahan ajar berbasis masalah untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis. *Jurnal Pendidikan*, 26(1), 45–56.  
<https://doi.org/10.21831/jp.v26i1.34892>

Saefudin, A., & Sriwiyanti, A. (2023). Boosting academic resilience through spiritual well-being: A study in juvenile prison in Indonesia. *Journal of Spirituality in Education*, 8(3), 201–214.  
<https://doi.org/10.1080/23289673.2023.10875>

Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Umamy, E., Yulianto, B., Tjahjono, T., & Shodiq, S. (2023). Integration of cyber literature and reading skills critical in literature courses in PBSI Project Wisnuwardhana University. *Jurnal Disastri*, 5(3), 504–512.  
<https://doi.org/10.33752/disastri.v5i3.4089>

Wenger, E. (2015). *Communities of practice: A brief introduction*. <https://wenger-trayner.com/introduction-to-communities-of-practice/>